

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Runtuhnya Orde Baru dan lahirnya era Reformasi, menumbuhkan harapan besar Keluarga Bulan Bintang untuk merehabilitasi Masyumi. Namun partai yang lahir dari Badan Koordinasi Umat Islam Indonesia (BKUI) tersebut tidak menggunakan nama Masyumi, melainkan Partai Bulan Bintang (PBB).<sup>1</sup> Sebagai partai penerus perjuangan Masyumi, partai ini tetap mengadopsi konsep perjuangan dan ideologi partai modernis tersebut, seperti yang dikemukakan oleh salah seorang pendiri PBB, Anwar Harjono:

“..., jadi dengan Partai Bulan Bintang, kita ingin dengan darah baru dan kesegaran baru untuk meneruskan cita-cita besar dari yang lama. Ini memang ada hubungan emosional dengan Masyumi.”<sup>2</sup>

Setelah PBB berdiri tanggal 17 Juli 1998, dilakukan usaha konsolidasi dengan Keluarga Bulan Bintang di daerah, termasuk Sumatera Barat. Proses terbentuknya Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sumatera Barat dimulai dari pembicaraan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB dengan Ketua Dewan Dakwah

---

<sup>1</sup>Mengapa partai ini tidak menggunakan nama Masyumi? *Pertama*, lima paket UU Politik yang mengatur tentang Pancasila sebagai satu-satunya untuk kekuatan sosial dan politik belum dihapus. Artinya bila UU Partai Politik mewajibkan setiap partai berasaskan Pancasila, maka partai yang lahir juga harus mengikuti asas yang sama. *Kedua*, bila partai tidak mengikuti aturan yang tercantum dalam UU Politik, maka keberadaannya tidak diakui pemerintah. Lebih lanjut lihat Ramlan Mardjoned, *Sejarah Partai Bulan Bintang. Dari MIAI sampai Deklarasi Partai Bulan Bintang*. (Jakarta: DPP PBB, 2001).

<sup>2</sup>Ramlan Mardjoned, *Sejarah Partai Bulan Bintang. Dari MIAI sampai Deklarasi Partai Bulan Bintang*. (Jakarta: DPP PBB, 2001), hlm. 69. Lihat juga dalam Tumpal Daniel S (ed.), *Masa Sulit Mengibarkan Panji Bulan Bintang. Dilema Partai Islam Ideologis*. (Jakarta: Tudiskalam, 2005), hlm. 54.

Islamiyah Indoensia (DDII) Sumatera Barat H.M Said Dt. Tan Kabasaran tanggal 3 Agustus 1998.<sup>3</sup> Sebagai realisasi dari pembicaraan tersebut, Anwar Harjono (sekretaris Masyumi pada periode akhir) selaku juru bicara Masyumi memberi mandat pada Moestamir Makmoer, sebagai ketua panitia persiapan pembentukan PBB di Sumatera Barat. Selain memberi mandat, DPP PBB juga meminta Moestamir untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat, seperti alim ulama, pimpinan ormas, cendekiawan muslim, pemuda, mahasiswa, kelompok profesi, dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Pasca keluarnya surat mandat, seluruh organisasi yang tergabung dalam Keluarga Bulan Bintang Sumatera Barat terdiri dari DDII Sumatera Barat, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Pelajar Islam Indonesia (PII) melakukan konsolidasi internal untuk pembentukan PBB Sumatera Barat. Setelah DPW PBB Sumatera Barat resmi terbentuk tanggal 17 September 1998, diikuti usaha pembentukan sayap partai, yang terdiri dari badan otonom dan badan khusus. Badan otonom merupakan badan yang bertugas membesarkan partai, mem-*backup* partai, serta menyampaikan misi partai. Termasuk dalam badan otonom ini adalah Muslimat Bulan Bintang<sup>5</sup> dan Pemuda Bulan Bintang. Sedangkan badan khusus yang dibentuk oleh DPW Sumatera Barat adalah Brigade Hizbullah Cabang, bertugas melakukan pengamanan.

---

<sup>3</sup>*Surat Nomor A.PP/36/IX/1998* tentang mandat untuk membentuk panitia pembentukan Partai Bulan Bintang di daerah Tingkat I/Propinsi Sumatera Barat.

<sup>4</sup>*Surat Keputusan A.PP/02/VIII/98* tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang.

<sup>5</sup>*Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muslimat Bulan Bintang Nomor: 028-A/PPMBB-Sek/SK/6/1431* tentang Pengesahan Susunan Pimpinan wilayah Muslimat Bulan Bintang Propinsi Sumatera Barat.

Persoalan yang muncul adalah hadirnya PBB di Sumatera Barat tidak menjamin partai ini mendulang raihan suara, seperti kemenangan Masyumi pada Pemilu 1955 di Sumatera Barat. Hal ini bisa dilihat dari partisipasi PBB Sumatera Barat pada Pemilu 1999 (meraih 3 kursi), 2004 (meraih 5 kursi), dan 2009 (meraih 3 kursi), menunjukkan raihan suara partai ini *fluktuatif*.<sup>6</sup> Merosotnya raihan suara PBB Sumatera Barat pada Pemilu 2009, menjadi sebuah tanda tanya besar bagi kalangan akademisi dan masyarakat, benarkah PBB Sumatera Barat merupakan lanjutan dari perjuangan Masyumi? Apakah terjadi kegagalan transmisi pemikiran di PBB Sumatera Barat? Ataukah cara pandang masyarakat Sumatera Barat yang telah berubah?

Persoalan transmisi pemikiran dari Masyumi kepada kader-kader PBB Sumatera Barat mulai terjadi, ketika Masyumi membubarkan diri pada tahun 1960. Proses transmisi terjadi dari tokoh-tokoh Masyumi baik dari pusat hingga tingkat lokal kepada kader-kader yang nantinya aktif di PBB Sumatera Barat. Tidak hanya itu, proses transmisi juga terjadi melalui persentuhan mereka dengan literatur, majalah, dan koran milik Masyumi.

Proses transmisi dari tokoh Masyumi juga terjadi, ketika kader-kader PBB Sumatera Barat itu dulunya aktif dalam organisasi, seperti HMI dan PII. Pada era 1950an, kader-kader binaan Moh. Natsir lebih banyak aktif di HMI dan PII. Melalui HMI, proses transmisi terjadi dari Moh. Natsir kepada Saidal Bahauddin. Pasca runtuhnya Masyumi tahun 1960, Saidal Bahauddin selanjutnya

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Hilman Syarifudin tanggal 7 Maret 2012 di Sungai Lareh Padang.

menularkan pemikiran-pemikiran dan pengalamannya kepada generasi HMI berikutnya, yakni Dasril Syah, Hilman Syarifuddin, dan Salmiyati.

Setelah tamat kuliah, sebagian dari kader-kader ini mengabdikan diri di DDII Perwakilan Sumatera Barat dan YARSI. Proses transmisi di DDII dan YARSI, menurut sebagian informan memperkuat pengetahuan mereka terhadap pemikiran dan perilaku politik tokoh-tokoh Masyumi. Melalui proses transmisi ini, kader-kader PBB Sumatera Barat memperoleh corak dan pandangan dari tokoh-tokoh Masyumi. Selanjutnya pemikiran mereka tentang Islam dan negara, syariat Islam, Pancasila, dan demokrasi lebih banyak diwarnai tokoh-tokoh Masyumi. Inilah sisi menarik dari proses transmisi pemikiran generasi Masyumi ke generasi PBB Sumatera Barat, selanjutnya mereka yang duduk di DPRD Sumatera Barat membumikan hasil-hasil pemikiran itu melalui Perda Anti Maksiat dan Perda Tulis Baca Al-Quran. Berangkat dari pemikiran di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang kontinuitas pemikiran Masyumi dalam PBB Sumatera Barat. Maka penulis memberi penelitian ini dengan judul **“Partai Bulan Bintang Wilayah Sumatera Barat (1998-2009).”**

## **B. Perumusan dan Batasan Masalah**

Batasan yang digunakan dalam penulisan ini meliputi batasan temporal dan batasan spasial. Untuk batasan temporal diambil periode tahun 1998-2009. Tahun 1998 merupakan awal pembentukan PBB Wilayah Sumatera Barat yang melibatkan person-person dalam organisasi DDII, PII, HMI, dan Keluarga Besar Bulan Bintang. Tahun 2009 diambil batasan akhir karena pada tahun tersebut

merupakan partisipasi PBB untuk ketiga kali dalam Pemilu masa Reformasi, namun suara partai ini mengalami penurunan jumlah raihan suara, dibandingkan Pemilu 2004. Sedangkan batasan spasial yang diambil adalah Propinsi Sumatera Barat sebagai wilayah aktivitas Partai Bulan Bintang.

Untuk memperjelas permasalahan dari penulisan ini, maka dirumuskan beberapa pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana aktivitas keluarga Bulan Bintang sejak 1945-1969?
2. Bagaimana proses terbentuknya PBB di tingkat pusat dan Sumatera Barat?
3. Bagaimana bentuk transmisi pemikiran dari tokoh-tokoh Masyumi ke kader PBB Sumatera Barat?
4. Mengapa pengaruh pemikiran Masyumi berpengaruh pada PBB Sumatera Barat?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Menganalisis aktivitas keluarga Bulan Bintang sejak 1945-1969.
2. Menganalisis proses terbentuknya PBB di tingkat pusat dan Sumatera Barat.
3. Menganalisis bentuk-bentuk transmisi pemikiran dari tokoh-tokoh Masyumi ke kader PBB Sumatera Barat.
4. Menganalisis pengaruh pemikiran Masyumi di PBB Sumatera Barat.

Manfaat dari penelitian tesis ini antara lain untuk memperkaya terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, sekaligus pembandingan dari penelitian yang berhubungan dengan aktivitas PBB dan parpol Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Manfaat lain yang diharapkan nantinya adalah hasil penelitian ini

sebagai sumber literatur yang berhubungan dengan ilmu sejarah dan ilmu sosial lainnya. Lebih jauh, dapat juga dijadikan bahan analisis maupun tambahan dalam rangka penelitian yang lebih mendalam di masa mendatang.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian tesis ini diarahkan pada proses transmisi pemikiran dari generasi Masyumi ke PBB Sumatera Barat. Karya-karya yang membahas mengenai partai politik sebenarnya banyak dijumpai. Herbert Feith dan Lance Castle mengkategorikan lima aliran politik yang sangat berpengaruh di Indonesia, yakni nasionalisme radikal, tradisionalisme Jawa, Islam, sosialisme demokratik dan komunisme.<sup>7</sup> Sedangkan aliran politik Islam, menurut Feith terbelah ke dalam tradisional dan modernis. Kelompok modernis atau reformis aktif berpolitik dan berpusat dalam Masyumi. Sementara kelompok tradisional atau konservatif berpusat dalam NU.<sup>8</sup> Kalangan tradisional bersifat lebih akomodatif dan kompromi, sedangkan Islam modernis lebih berpegang pada prinsip politik yang lebih konkrit.

Yusril Ihza Mahendra dalam bukunya yang berjudul *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jamaat al-Islami (Pakistan)* melihat secara komprehensif bagaimana perkembangan Partai Masyumi dengan Partai Jamaat al-Islami yang membawa ideologi berbeda dalam pergerakan politiknya. Studi komparatif yang

---

<sup>7</sup>Herbert Feith dan Lance Castle (ed), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. vii.

<sup>8</sup> Herbert Feith dan Lance Castle (ed), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. viii.

dilakukan oleh Yusril untuk melihat pengaruh modernisme dan fundamentalisme terhadap partai politik Islam. Menurut Yusril, warna moderat yang diusung oleh Masyumi menitik beratkan pada aspek kebebasan berpikir (*ijtihad*), dibandingkan dengan fundamentalis yang diusung oleh Jamaat al-Islami yang menekankan pada aspek *ijma*'.<sup>9</sup>

Ramlan Mardjoned dalam bukunya *Sejarah Partai Bulan Bintang: dari MIAI sampai Deklarasi Partai Bulan Bintang* menguraikan secara lugas mengenai hubungan historis antara Masyumi, Parmusi, dan proses lahirnya Partai Bulan Bintang pada tanggal 17 Juli 1998.<sup>10</sup> Lahirnya Partai Bulan Bintang pada dasarnya merupakan benang sejarah perjuangan Islam di Indonesia, mulai dari masuknya Islam ke Nusantara, perlawanan terhadap kolonialisme, revolusi kemerdekaan, sampai kini. Sejak keluarnya Maklumat X tahun 1945 partai politik menjamur dengan beragam ideologi, salah satu partai modernis Islam yang lahir pada masa itu adalah Masyumi. Dalam perjalanan selanjutnya partai ini dibubarkan oleh Presiden Soekarno tahun 1960 karena dituduh ikut mendalangi peristiwa PRRI di Sumatera Tengah. Pada masa awal Orde Baru muncul harapan dari kalangan keluarga bulan bintang untuk menghidupkan kembali Masyumi, namun usulan ini ditolak mentah-mentah oleh Presiden Soeharto. Adapun alasan Presiden Soeharto menolak rehabilitasi Masyumi berdasarkan keterlibatan tokoh-tokoh Masyumi dalam peristiwa PRRI. Maka runtuhnya rezim Orde Baru merupakan salah satu momen penting yang ditunggu-tunggu keluarga besar bulan bintang, untuk

---

<sup>9</sup>Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jamaat al-Islami (Pakistan)*. (Jakarta: Paramadina, 1999)

<sup>10</sup>Ramlan Mardjoned, *Sejarah Partai Bulan Bintang: Dari MIAI sampai Deklarasi Partai Bulan Bintang*. (Jakarta: DPP PBB, 2001)

merehabilitasi kembali Partai Masyumi yang pernah berjaya pada era 1950-an. Dalam karya ini, Ramlan Mardjoned juga mengutip pernyataan dari Yusril Ihza Mahendra yang menegaskan bahwa PBB lahir sebagai representasi dan kesinambungan ideologi dari Partai Masyumi.

Gusti Asnan dalam *Memikir Ulang Regionalisme Sumatera Barat tahun 1950-an* banyak mengulas tentang kehadiran dan aktivitas tokoh-tokoh Masyumi baik sebelum maupun pada masa pergolakan daerah. Tingginya aktivitas tokoh-tokoh Masyumi dan seringnya mereka melakukan *tourne* ke berbagai daerah di Sumatera Tengah, menjadikan partai ini menjadi pemuncak pada Pemilu 1955, terutama untuk kawasan Sumatera. Dalam pembahasan lainnya, Gusti Asnan juga mengupas bagaimana *concern*-nya Masyumi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah-daerah yang bergejolak, termasuk salah satunya di Sumatera Barat.<sup>11</sup>

Hary Efendi dalam tesisnya yang berjudul *Konflik antara Partai Masyumi dengan Partai Perti dalam Pergolakan Politik di Sumatera Barat (1956-1960)*, melihat bagaimana suasana konflik yang terjadi antara kedua parpol Islam yang berpengaruh di Sumatera Barat dalam bentuk perbedaan sikap dan pandangan politik. Masyumi sebagai partai berhaluan reformis menempatkan dirinya sebagai oposisi pemerintah dan anti PKI, berseberangan sikap dengan Perti yang didukung kaum tua berhaluan konservatif lebih memilih sikap

---

<sup>11</sup>Gusti Asnan, *Memikir Ulang Regionalisme Sumatera Barat tahun 1950-an*. (Jakarta: Yayasan Obor, 2007).



akomodatif terhadap Soekarno dan PKI.<sup>12</sup> Dampak luas dari konflik kedua partai Islam ini adalah pada peristiwa pergolakan daerah di Sumatera Barat (1958-1961), dimana Masyumi yang dianggap “pemberontak” dibubarkan paksa oleh Soekarno, sedangkan Perti tetap eksis dan kooperatif dengan seluruh kebijakan Soekarno.

Berdasarkan karya-karya di atas pada umumnya membahas tentang partai politik Islam yang ada di Indonesia, terutama Masyumi sebagai salah satu pelopor partai Islam modernis dan hubungan kesinambungannya dengan Partai Bulan Bintang. Meskipun demikian, karya-karya yang secara khusus menyajikan kiprah PBB Sumatera Barat dan proses transmisi ideologi dari generasi Masyumi ke generasi PBB Sumatera Barat, sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang membahas.

#### **E. Kerangka Analisis**

Dalam kajian terhadap partai politik Islam, Yusril Ihza Mahendra membagi partai politik Islam ke dalam dua kelompok, yakni modernisme dan fundamentalisme.<sup>13</sup> Menurut Yusril, kelompok modernisme melihat dalam masalah *muamalah* (kemasyarakatan), doktrin hanya memberikan ketentuan-ketentuan umum yang bersifat universal. Bagi kaum modernis, masyarakat terus berubah dan berkembang dari zaman ke zaman. Sedangkan fundamentalisme

---

<sup>12</sup>Hary Efendi, “Konflik antara Partai Masyumi dengan Partai Perti dalam Pergolakan Politik di Sumatera Barat (1956-1960)”, *Tesis*. (Yogyakarta: PPS UGM, 2010), hlm. 236.

<sup>13</sup>Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jamaat al-Islami (Pakistan)*. (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 29.

memandang bahwa *ijma'* zaman sahabat Nabi merupakan *ijma'* yang mengikat generasi kaum muslim hingga akhir zaman, artinya tidak dapat diubah oleh generasi berikutnya.<sup>14</sup> Dari uraian Yusril mengenai partai Islam modernis dan fundamentalis, PBB pada dasarnya tergolong partai modernis yang sehaluan dengan pendahulunya, yakni Masyumi.

Persoalan yang muncul adalah seberapa efektif transmisi ideologi dari pihak Masyumi ke generasi Partai Bulan Bintang dalam memahami konsep perjuangan dan nilai. Proses transmisi atau penyebaran didefinisikan sebagai proses yang dengannya inovasi-inovasi menyebar.<sup>15</sup> Proses transmisi dipandang sebagai proses komunikasi yang melibatkan sumber atau penyampai, pengambil atau penerima objek yang disebar dan suatu saluran atau media penyebaran yang menghubungkan sumber dan penerima.<sup>16</sup>

Dampak transmisi pemikiran lebih ditekankan kepada psikologis aktor, karena sepanjang ia nyata ada di dalam pikiran para aktor penting, dan mengarahkan mereka untuk menyakini kemungkinan, hasrat atau kebutuhan akan ide yang disebar itu. Dalam kajian tentang transmisi ide, Anders Uhlin mengawali kajian tentang transmisi pemikiran dengan menelaah pertanyaan fundamental, yakni: apa yang disebar? Bagaimana ia tersebar? Mengapa ia tersebar? Dan apa dampak dari proses penyebaran itu? Dengan menjawab

---

<sup>14</sup>Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jamaat al-Islami (Pakistan)*. (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 32.

<sup>15</sup>Anders Uhlin, *Oposisi Berserak. Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*. (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 16.

<sup>16</sup>Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga*. (Jakarta: Grafiti, 1995).

pertanyaan-pertanyaan ini, menurut Uhlin, fenomena transmisi pemikiran dapat menjadi lebih konkret.

Uhlin membagi dua kategori objek transmisi pemikiran; dorongan semangat secara umum dan ide-ide tertentu yang disebarakan.<sup>17</sup> Mengenai bagaimana proses transmisi itu berjalan, Uhlin tertarik pada aktor dan interaksi yang terlibat di dalam proses tersebut. Sangat perlu mengkaji individu-individu sebagai penerima, karena Uhlin percaya bahwa proses penyebaran itu merupakan proses kognitif dan psikologis. Sumber transmisi adalah sistem dan peristiwa-peristiwa, serta aktor organisasi maupun individu.

Sedangkan media yang menghubungkan antara sumber dan penerimanya merupakan hal yang juga amat penting bagi proses transmisi pemikiran. Uhlin, membagi saluran ini kedalam dua jenis; komunikasi satu arah berupa media massa dan komunikasi dua arah berupa kontak interpersonal. Aspek penting lain dari media adalah berhubungan dengan proses kognitif dan psikologis yang dengannya individu-individu memilih dan mentransformasikan pemikiran-pemikiran yang disebarakan. Disinilah terjadi proses pengambilan pelajaran secara aktual.<sup>18</sup>

Ada tiga hasil yang diperoleh dari proses transmisi ini. Pemikiran yang disebarakan dapat diambil tanpa perubahan apa pun, disesuaikan dengan kondisi kekinian atau ditolak. Pengambilan (adopsi) berarti bahwa pemikiran itu dipandang cocok dan berguna. Pemikiran ini diambil tanpa ada perubahan. Proses ini merupakan peniruan atau percontohan. Penyesuaian berarti suatu pemikiran

---

<sup>17</sup>Anders Uhlin, *Oposisi Berserak. Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia...*, hlm. 16.

<sup>18</sup>Anders Uhlin, *Oposisi Berserak. Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia...*, hlm. 19.

diterima dengan modifikasi oleh aktor-aktor tertentu untuk mencocokkannya dengan situasi setempat. Sementara penolakan berarti bahwa aktor tertentu secara eksplisit menolak suatu pemikiran karena tidak cocok dengan situasi setempat saat itu. Meski terjadi penolakan, menurut Uhlin penolakan itu tidak pernah bersifat permanen. Suatu ide atau pemikiran bisa jadi ditolak “disini dan pada saat ini” tetapi kemudian diambil ditempat atau saat lain.<sup>19</sup>

Pertanyaan “mengapa ide-ide itu tersebar?” menurut Uhlin merupakan pertanyaan menarik, sama menariknya dengan pertanyaan “mengapa sebuah ide tidak tersebar?” Oleh karena itu perlu dijelaskan sukses dan gagalnya proses transmisi dilakukan. Perlu pula dijelaskan mengapa ide tertentu diambil dan atau disesuaikan sementara yang lain di tolak oleh berbagai aktor.<sup>20</sup> Diakui oleh Uhlin, kerangka konseptual bagi kajian atas proses transmisi pemikiran tidak bebas dari masalah metodologis, yakni menjawab pertanyaan yang muncul yaitu bagaimana secara empiris dapat ditegaskan bahwa sebuah proses transmisi pemikiran itu telah terjadi.

Istilah Keluarga Bulan Bintang merujuk pada seluruh organisasi yang mendukung lahirnya Masyumi tahun 1945. Setelah Masyumi menyatakan membubarkan diri pada era 1960, istilah Keluarga Bulan Bintang tetap dipakai dalam berbagai kegiatan-kegiatan eks pendukung Masyumi. Demikian halnya saat proses lahirnya PBB, organisasi-organisasi pendukung Keluarga Bulan Bintang,

---

<sup>19</sup>Anders Uhlin, *Oposisi Berserak. Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia...*, hlm. 19.

<sup>20</sup>Anders Uhlin, *Oposisi Berserak. Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia...*, hlm. 19.

seperti DDII, HMI, PII, BKUI, dan lain sebagainya turut berperan aktif dalam mendorong PBB menjelma menjadi partai pejuang syariat Islam.

Sebagai partai Islam modernis, PBB Sumatera Barat yang berpegang pada nilai-nilai *rahmatan lil aalamiin*, *platform Izzul Islam Wal-Muslimin*, partai ini mengembangkan sikap politik sesuai dengan tuntutan Islam, dan mengkritisi kebijakan pemerintah bila bertentangan dengan kesejahteraan masyarakat. Gerakan *Islam Wal-Muslimin* di PBB, menurut Sahar L Hasan dijalankan dengan Empatik (Empat Gerakan Politik), di antaranya:<sup>21</sup>

1. Dakwah politik, artinya bahwa partai harus melakukan *dakwah bil hal* politik dengan memprakarsai di setiap lingkungan dan mengupayakan kegiatan-kegiatan peduli terhadap masyarakat sekitar.
2. Memperbaiki manajemen dan konsolidasi partai, dengan melakukan perencanaan yang matang dalam setiap pekerjaan dan menjalankan konsolidasi serius sejak dini.
3. Mengintensifkan dan meningkatkan kualitas pendidikan politik tidak hanya kepada kader Bulan Bintang, tapi PBB juga memprakarsai program-program politik yang melibatkan orang banyak.
4. Silaturahmi politik, artinya rakyat harus bisa diidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingannya, terutama ditujukan kepada *influencer* sehingga dapat diketahui maunya.

## **F. Metode Penelitian dan Bahan Sumber**

Sebagaimana lazimnya kajian sejarah, penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian ilmu sejarah yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan penulisan sejarah (*historiografi*).<sup>22</sup>

Tahapan pertama yaitu heuristik. Heuristik merupakan proses mengumpulkan sumber dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian

---

<sup>21</sup>Lihat pendapat Sahar L Hasan dalam “PBB Membangun Potensi Ummat”, *Publik* tanggal 7 Februari 2006.

<sup>22</sup>Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*. (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 35.

lapangan. Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dan relevan dengan penelitian. Kegiatan ini dilakukan di Ruang Baca Fakultas Ilmu Budaya, Ruang Baca Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang, Perpustakaan Wilayah Sumatera Barat, Arsip Nasional RI, dan Perpustakaan Nasional RI.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dokumen tertulis dan data lisan (informan). Adapun dokumen tertulis (arsip) yang telah ditemukan antara lain: Anggaran Dasar Partai Politik Islam Indonesia Masyumi tanggal 29 Agustus 1952, Tafsir Asas Masyumi, Program Perjuangan Masyumi, Pegangan bagi Pendukung PRRI, Manuskrip Moh. Natsir (Medan, 17 Agustus 1961), SK.A.PP/02/VIII/98 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang, SK. PP/22/1998 tentang pengesahan susunan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang periode 1998-2003, dan SKR.PP/379/2003 tentang pengesahan susunan dan personalia Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Propinsi Sumatera Barat periode 2000-2005.

Data lisan diperoleh melalui wawancara dengan beberapa tokoh yang pernah terlibat dalam Partai Masyumi, maupun PBB Sumatera Barat yang dibagi menjadi beberapa kelompok:

1. Perintis DPW PBB Sumatera Barat. Sumber lisan primer yang penulis wawancara dalam kategori kelompok ini antara lain: Asma Malin (84 tahun), dan Hasan Byk Dt Tan Maradjo (87 tahun).

2. Pengurus DPW PBB Sumatera Barat. Sumber lisan primer berupa hasil wawancara dengan berbagai kelompok: Aisyatul Nasyroh Natsir, Dasril Syah, Anisral, dan Afdhal,
3. Anggota dewan dari DPW PBB Sumatera Barat. Sumber lisan primer yang penulis wawancara dalam kategori kelompok ini antara lain: Moestamir Makmoer, Hilman Syarifuddin, Djonimar Boer, dan Salmiyati.

Setelah terkumpulnya sumber yang dicari dan diperlukan, maka dilakukan kritik sumber yang disebut juga verifikasi atau kritik sejarah. Ada dua macam kritik sumber, yang pertama adalah kritik ekstern, yaitu mempertanyakan keaslian sumber atau otensitasnya. Kedua adalah kritik intern, yaitu membandingkan antara data yang diperoleh dengan sumber lisan yang diperoleh.

Selanjutnya dilakukan interpretasi atau penafsiran, yaitu menganalisa dan menguraikan data yang sudah dikritisi dan menjadi fakta, dipisah dan dikelompokan menurut klasifikasi topik yang sudah ditentukan.<sup>23</sup> Dalam tahap interpretasi digunakan penjelasan sejarah yang berisi kausalitas (sebab-akibat). Penjelasan kausalitas dapat dibagi dalam dua kelompok, yakni sebab langsung (*direct cause*) dan sebab tidak langsung (*in direct cause*). Tahapan terakhir adalah historiografi atau penulisan. Tahap ini akan merekonstruksi sejarah secara keseluruhan dalam bentuk tesis yang merupakan tujuan akhir dari penelitian ini.

---

<sup>23</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Jakarta: Bentang, 1995), hlm. 98-103.

## **G. Sistematika Penulisan**

- Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, kerangka analisa, metode dan bahan sumber, dan sistematika penulisan
- Bab II berisi tentang proses terbentuknya Masyumi Sumatera Barat, pembubaran Masyumi, dan aktivitas keluarga Bulan Bintang pasca 1960.
- Bab III diuraikan proses berdirinya DPP PBB, DPW PBB Sumatera Barat. Di samping itu, pada bab ini juga dijelaskan tentang partisipasi PBB Sumatera Barat pada Pemilu 1999, 2004, dan 2009. Selain itu, bab ini melihat bagaimana proses transmisi pemikiran dari tokoh Masyumi ke Partai Bulan Bintang Sumatera barat
- Bab IV berisi pengaruh pemikiran dari tokoh-tokoh Masyumi kepada Partai Bulan Bintang Sumatera Barat, seperti pemikiran Islam dan Negara, syariat Islam, Pancasila, dan demokrasi.
- Bab V berisi kesimpulan dan saran.